

**KEBIJAKAN *ILLEGAL, UNREPOTRED, UNREGULATED FISHING* YANG
DILAKUKAN OLEH MENTERI-MENTERI PADA PERIODE PRESIDEN JOKO
WIDODO TAHUN 2019-2024**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Universitas
Bakrie, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie



CALISTA PARAMESTI A.

1211004090

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS BAKRIE

JAKARTA 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calista Paramesti A.

NIM 1211004090

Kelas : Tugas Akhir

Jumlah Kata : 23.514 Kata

Referensi : 86

Menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa ada unsur plagiat baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Karya tulis ini belum pernah dipakai dengan konten yang sama, untuk proyek, laporan dan tugas di kelas yang lain.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka dan telah mengikuti prosedur *quotation* yang benar.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan dunia pendidikan, dan dianggap gagal dengan nilai (F) di mata kuliah Tugas Akhir.

Jakarta, 21 Agustus 2026



Calista Paramesti A.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Calista Paramesti A.

NIM 1211004090

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* yang Dilakukan Oleh Menteri-Menteri Pada Periode Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

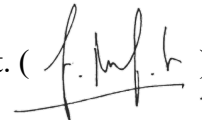
Pembimbing : Dr. Muhammad Badaruddin, S.sos., M.A



Penguji I: Sellita, S.Sos, M.A



Penguji II: Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt. (



Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 21 Agustus 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie—institusi pendidikan yang menjadi tempat belajar dan menimba ilmu bagi penulis. Dalam proses penelitian tugas akhir serta selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan pengetahuan, bantuan, kritik serta saran, dukungan dan pengalaman yang tidak ternilai. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Bakrie.
2. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala ilmu dan pengetahuan serta bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan.
3. Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik.
4. Dosen-dosen program studi ilmu politik lainnya, serta staf-staf Universitas Bakrie.
5. Mama dan Papa tercinta yang telah mencintai, melindungi dan mendukung baik secara mental maupun finansial selama penulis menempuh masa studi dan selamanya.
6. Muhammad Hazel Ariefabian selaku adik yang banyak memberi semangat dan meyakinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Syafa Rachma Puteri, Nazwa Yuvita Sari, Syami Mutiara, Jenet Martha, Natasya Salviandra selaku teman terdekat penulis yang senantiasa memberi dukungan dan dorongan untuk tidak menyerah.
8. Rahmat Adi Pratama, Jeremia Saut, Raisha Latifha Aji, Savira Humaira, Nadia Efrina, Faris, Gregorius Jodi, Azzam Fahrezi, Emma Louise selaku teman terdekat di Universitas Bakrie yang telah berjuang bersama dan memberi dukungan serta motivasi kepada satu sama lain.
9. Seluruh rekan kerja yang terus memberikan ruang dan kepercayaan agar penulis bisa menyelesaikan masa studi.
10. Ahmad Rifqy yang terus percaya dan menemani penulis selama masa studi maupun penelitian, memberi dukungan mental dan kehadiran tanpa henti.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Calista Paramesti A.
NIM 1211004090
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Penelitian Kualitatif

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* yang Dilakukan Oleh Menteri-Menteri Pada Periode Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Dibuat di Jakarta

Tanggal 21 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Calista Paramesti A.

Kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* yang Dilakukan Oleh Menteri-Menteri Pada Periode Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2024

Calista Paramesti A.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim seluas 5,8 juta km² menghadapi ancaman serius berupa praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yang merugikan negara secara ekonomi, mengancam kesejahteraan nelayan lokal, dan melemahkan kedaulatan maritim. Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2019–2024, tiga Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat—Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo, dan Sakti Wahyu Trenggono—menerapkan pendekatan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani IUU Fishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan IUU Fishing oleh ketiga menteri tersebut serta menganalisis konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan pendekatan yang diterapkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan resmi, jurnal ilmiah, dan publikasi organisasi internasional, yang dianalisis melalui kerangka realisme, teori analisis kebijakan luar negeri, dan *state-centric theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan IUU Fishing bersifat dinamis dan berubah seiring pergantian kepemimpinan: Susi Pudjiastuti menerapkan pendekatan tegas berbasis penenggelaman kapal yang menekankan kedaulatan; Edhy Prabowo bergeser ke deregulasi ekonomi yang justru melemahkan rezim anti-IUU Fishing akibat lemahnya pengawasan; sementara Sakti Wahyu Trenggono mengusung reformasi tata kelola berbasis data melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), meski implementasinya masih menghadapi tantangan kelembagaan dan resistensi sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan IUU Fishing Indonesia bersifat *state-centric*, dan konsistensi kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas serta keberlanjutan tata kelola sumber daya laut nasional.

Kata Kunci: IUU Fishing, kebijakan maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedaulatan maritim, Joko Widodo

***Policies on Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Implemented by
Ministers During President Joko Widodo's 2019–2024 Term***

Calista Paramesti A.

Abstract

As the world's largest archipelagic state, with a maritime territory of 5.8 million km², Indonesia faces a serious threat from Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), which causes economic losses, undermines the welfare of local fishers, and weakens maritime sovereignty. During President Joko Widodo's administration (2019–2024), three Ministers of Marine Affairs and Fisheries—Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo, and Sakti Wahyu Trenggono—adopted markedly different policy approaches to addressing IUU Fishing. This study aims to examine how each minister handled the issue and to analyze the consistency, effectiveness, and sustainability of their respective approaches. Using a descriptive qualitative method with a literature-study data collection technique, the research draws on secondary data from policy documents, official reports, academic journals, and publications of international organizations, analyzed through the frameworks of realism, foreign policy analysis theory, and state-centric theory. The findings reveal that Indonesia's IUU Fishing policy has been dynamic, shifting with each change in leadership: Susi Pudjiastuti pursued a coercive, sovereignty-driven approach centered on sinking foreign vessels; Edhy Prabowo shifted toward economic deregulation that, due to weak oversight, inadvertently weakened the anti-IUU Fishing regime; while Sakti Wahyu Trenggono introduced data-driven governance reform through the Measured Fishing Policy (Penangkapan Ikan Terukur), though its implementation continues to face institutional challenges and social resistance. The study concludes that Indonesia's IUU Fishing policy remains fundamentally state-centric, and that leadership consistency is a key determinant of effective and sustainable national marine resource governance.

Keywords: IUU Fishing, maritime policy, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, maritime sovereignty, Joko Widodo

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
Abstrak	v
Abstract.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	8
1.2.1 Penelitian Pertama	8
1.2.2 Penelitian Kedua	9
1.2.3 Penelitian Ketiga	10
1.2.4 Penelitian Keempat	11
1.2.5 Penelitian Kelima.....	11
1.2.6 Penelitian Keenam	12
1.2.7 Penelitian Ketujuh.....	13
1.2.8 Penelitian Kedelapan	14
1.2.9 Penelitian Kesembilan	14
1.2.10 Penelitian Kesepuluh	15
1.3 Rumusan Masalah dan Batas Penelitian	16
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	17
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Kerangka Teori.....	20
2.1.1 Realisme.....	20
2.1.2 Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri	26
2.1.3 State-Centric Theory	28
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30

2.3 Alur Berpikir dan Hipotesis Sementara	31
2.3.1 Alur Berpikir	31
2.3.2 Hipotesis Sementara.....	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian Kualitatif.....	32
3.2 Unit Analisis	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Pengolahan dan Analisis Data.....	34
3.6 Tabel Operasionalisasi Konsep	35
BAB IV	37
Analisis	37
4.1 Dinamika Penanganan IUU Fishing dalam Pemerintahan Joko Widodo	37
4.2 Analisis Perbandingan Kebijakan Tiga Menteri Kelautan dan Perikanan	44
4.2.1 Susi Pudjiastuti dan Pendekatan Kedaulatan Maritim	44
4.2.2 Edhy Prabowo dan Pelemahan Rezin Anti-IUU Fishing.....	48
4.2.3 Sakti Wahyu Trenggono dan Transisi Menuju Tata Kelola Berkelanjutan	49
4.3 Periode Isu dan Konteks Tantangan.....	52
4.3.1 Dinamika Global IUU Fishing dan Tekanan Internasional.....	53
4.3.2 Tantangan Struktural Pengelolaan Perikanan Indonesia	54
4.4 Pendekatan Problem Solving	56
4.4.1 Integrasi Pendekatan Struktural dan Penegakan Hukum	57
4.4.2 Reformasi Tata Kelola sebagai Instrumen Pencegahan	58
4.4.3 Keterbatasan Implementasi dan Tantangan Awal PIT	59
4.5 Analisis <i>Plus-Minus</i> Kebijakan.....	60
BAB V	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70

Daftar Tabel

Table 1 - Tabel Operasionalisasi Konsep.....	35
---	----